**Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Reformasi (1999-2009)**

***THE GENERAL ELECTION OF THE INDONESIA TO THE NATIONAL HISTORY REFORM (1999-2009)***

Sri Wiji Lestari (T4ry\_Sri@yahoo.co.id).

Yudi Prasetyo

Priyanto Widodo

Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Sidoarjo

Jl. Jenggala, Kotak Pos 149 Kemiri, Sidoarjo

**Abstrak**

Pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Lama sudah dapat dikategorikan sebagai pemilihan umum yang demokratis, dengan adanya banyak partai yang ikut serta dalam pemilihan umum menandakan adanya kebebasan dalam kehidupan berpolitik, sedangkan pada masa Orde Baru kedemokratisan tersebut luntur seiring dengan berkuasanya rezim Soeharto yang selalu mengekang kehidupan berpolitik bangsa Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum pada masa Reformasi khususnya pemilihan umum 2004 lebih demokratis karena pelaksanaan pemilu tersebut dapat mewakili aspirasi rakyat apalagi dengan sistem pemilihan umum yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena dengan sistem kombinasi antara sistem distrik dan proporsional maka rakyat dapat mengetahui dan mengenal seperti apakah wakil rakyat yang akan menyalurkan aspirasi mereka. Pelaksanaan pemilihan umum dalam Sejarah Nasional Indonesia yang telah dilaksanakan sejak Orde Lama sampai dengan masa Reformasi maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum masa Reformasi khususnya pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum yang lebih demokratis.

Kata kunci: *Pemilihan Umum, Tahun 1999-2009*

**Abstract**

Elections in the Old Order had to be categorized as democratic elections, with many parties participating in the elections indicate the existence of freedom in political life, while in the New Order kedemokratisan the fade along with the Soeharto regimes always curb life Indonesian national politics, elections at the Reformation especially the 2004 elections more democratic because an election could represent the aspirations of the people especially the electoral system that is different from previous elections because the system is a combination between the district and the proportional system the people can know and recognize as whether representatives who will channel their aspirations.

Elections in the National History of Indonesia has been carried out since the Old Order until the time of the Reformation, it can be concluded that the implementation of electoral reforms especially during the 2004 elections are more democratic elections.

*Keywords: Elections, Year 1999-2009*

Alpha

1. **Pendahuluan**

Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan beberapa kali antara lain pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu 1955 berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu pada pemilihan umum 1955 semua wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada yang diangkat [[1]](#footnote-1).

Pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Indonesia memiliki karakteristik sendiri–sendiri yang sangat menarik untuk diteliti terutama pemilihan umum pada masa Orde Baru dan pemilihan umum 2004. Perbandingan yang dimaksud disini adalah asas pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan umum, serta dampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah guna mengungkap kejadian– kejadian yang berhubungan dengan masa lalu. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman sejarah (Gottschlak 1983:40)[[2]](#footnote-2). Adapun langkah–langkah dalam metode sejarah adalah Dalam pengumpulan data yang berupa sumber–sumber sejarah peneliti telah mendatangi beberapa perpustakaan, kegiatan yang dilakukan dalam metode ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber seperti buku atau literatur yang sesuai dengan topik penelitian, dokumen yang telah dicetak, surat kabar dan internet, Interpretasi dan Historiografi.

1. **Hasil dan Pembahasan**

Dalam ilmu politik sistem pemilihan umum diartikan sebagai kumpulanmetode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Pada saat sebuah lembaga perwakilan rakyat baik DPR/DPRD dipilih maka sistem pemilihan mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi. Sementara itu pemilihan presiden, gubernur dan bupati yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan melihat kenyataan itu maka betapa pentingnya sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi.Hal–hal yang sangat perlu diperhatikan dalam sistem pemilihan adalah apa yang disebut dengan “*electrocal formula*“ yaitu apakah menggunakan sistem pluralitas yang di Indonesia disebut sebagai sistem distrik atau *sistem proporsional representation* dengan berbagai macama variasinya, seperti *non transferable vote, d’hondt rule, sainte lague* dan lain–lain. *Electrocal formula* menentukan alokasi kursi yang akan diberikan kepada masing–masing partai yang bersaing.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias *politica* dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (*accountable*), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan.

Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila. Selama 25 Tahun berdiri Republik Indonesia ternyata bahwa masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana, dalam masyarakat yang beranekaragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.

Pemilu merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota–anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Dari pelaksanaan pemilihan umum sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sampai pada Orde Reformasi sekarang ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, masyarakat sudah mulai menuntut agar pemilihan umum segera dilaksanakan. Pemilu baru berlangsung pada bulan September dan Desember 1955. Pemilu ini sangat menarik perhatian karena selain merupakan pengalaman pertama dalam bidang politik yang bersifat nasional dalam menjalankan demokrasi, pemilu ini juga merupakan konsensus nasional yang pertama kalinya dicapai pada masa pasca revolusi nasional. Pemilu 1955 sudah dapat dikategorikan sebagai pemilihan umum yang sangat demokratis sebab pemilihan umum 1955 diikuti oleh banyak partai politik yang menandakan adanya kebebasan berpolitik, rakyat menggunakan hak pilihnya dengan ikut berpartisipasi pada pemilihan umum, pemilihan umum telah menghasilkan lembaga legislatif, adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independent sehingga pemilihan umum 1955 dapat dikategorikan sebagai pemilihan umum yang demokratis.

Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilaksanakan 6 kali penyelenggaraan pemilu yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dengan menggunakan sistem proporsional. Dari pelaksanaan pemilu tersebut Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum berkala setiap 5 tahun sekali kecuali tahun 1977. Pemilu Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat, hal itu karena pemilu-pemilu masa Orde Baru dilaksanakan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada lemgaga-lembaga birokrasi. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu tapi juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi partai politik milik pemerintah yaitu Golongan Karya.

Dalam setiap pemilihan umum kompetisi ditekan seminimal mungkin dan keberagaman pandangan tidak diperbolehkan. Kemenangan Golkar dalam 6 (enam) kali pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah Orde Baru pada hakekatnya merupakan bukti adanya ketidak demokratisan pelaksanaan Pemilihan Umum. Dapat disimpulkan pada masa Orde Baru pelaksanaan Pemilu di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara demokratis.

Sejak Reformasi dikumandangkan di Indonesia sudah dua kali dilaksanakan pemilihan umum yaitu tahun 1999 dan 2004. Pada masa reformasi ini konsep politik jauh berbeda dengan masa Orde Baru karena Reformasi lebih menekankan pada kehidupan yang demokratis dengan memberi kebebasan yang seluas-luasnya pada setiap masyarakat. Dalam waktu yang singkat muncul partai politik yang jumlahnya sangat banyak dengan beragam tujuan dan asas partai, basis massa yang mencerminkan kompleksivitas kehidupan bangsa Indonesia yang sebenarnya terdiri dari beragam perbedaan.

Pemilihan umum masa Reformasi merupakan Pemilu yang demokratis jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu masa-masa sebelumya. Kegagalan-kegagalan masa pemerintah Soeharto menjadi pelajaran yang berharga untuk pelaksanaan pemilihan umum masa Reformasi. Pemilihan umum 1999 yang merupakan karya besar untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat bukan merupakan sekelompok elit politik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersifat netral.

Pemilu 1999 sudah bersifat demokratis dan hal tersebut lebih disempurnakan lagi pada pelaksanaan Pemilu 2004 dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilu 2004 dapat dilaksanakan dengan lancar dan dalam prosedural resmi peraturan perundangan yang berlaku meskipun terjadi kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, tapi hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pemilihan umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum masa Reformasi merupakan pelaksanaan Pemilu yang demokratis dalam Sejarah Nasional Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Baru dan pemilihan umum pada masa Reformasi sangat berbeda dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi sistem pemilihan umum, Pemilu Orde Baru menggunakan sistem proporsional sedangkan Pemilu 2004 menggunakan system kombinasi atau campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik.

Jika dilihat dari hak untuk memilih, masa Orde baru adanya pengecualian anggota ABRI yang aktif sebagai pemilih karena adanya dwifungsi ABRI sedangkan pada masa reformasi semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih tanpa terkecuali termasuk polisi dan militer aktif karena pada masa reformasi sistem dwi fungsi ABRI telah dihapus. Perbedaan lain jika dilihat dari kemampuan melaksanakan fungsi pemilihan umum, maka pemilihan umum masa Reformasi masih lebih unggul, hal tersebut bisa di ketahui jika kita bandingkan dengan aturan yang dipakai dalam proses Pemilu, dimana dalam pelaksanaan Pemilu masa reformasi bersifat netral KPU bersifat otonom, peran pemerintah bersifat teknis administrative, sementara Organisasi Peserta Pemilihan Umum (OPP) berperan penting dalam seluruh proses pemilihan umum. Dapat kita bandingkan dengan Pemilu Orde Baru dimana dengan Undang-Undang dibawah Orde Baru yang menekankan peran pemerintah sebagai pelaksana dan penyelenggara pemilihan umum sedangkan OPP sangat marginal di dalamnya.

Dilihat dari asas pemilihan umum, pada masa Orde Baru asas Pemilu adalah Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), sedangkan pada masa Reformasi menggunakan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan Jurdil). Dengan adanya tambahan asas jujur dan adil diharapkan tidak adanya kecurangankecurangan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Dengan banyaknya jumlah peserta pemilihan umum dapat mewakilkan adanya kebebasan berpendapat dalam masa reformasi, berbeda dengan masa Orde Baru dimana pendapat rakyat diabaikan demi kepentingan pemerintah. Sebagian kecil perbedaan pelaksanaan pemilihan umum masa Orde Baru dan masa Reformasi tersebut maka kesimpulannya bahwa pemilihan umum masa Reformasi merupakan Pemilihan Umum yang berhasil mewakili aspirasi rakyat dengan kata lain pemilu tersebut merupakan ciri demokrasi Indonesia.

**DAFTAR RUJUKAN**

Asshidique, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di**Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an).* Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Budiardjo, Miriam.1998. *Dasar–dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

---------------------- 1994a. *Demokrasi Di Indonesia (Demokrasi Parlementer Dan* *Demokrasi Pancasila)*. Jakarta: Gramedia.

Gazalba, Sidi.1981*. Pengantar Ilmu Sejarah Sebagai Ilmu*, Jakarta: Batara Karya Aksara.

Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah* *Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.

Hikam, Muhammad. 1990. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ibrahim,Herman dan Siagian, Faisal.1999*. Pemilu dan Reformasi Sistem* *Kepartaian.* Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Depdagri.

Isman, Ign dkk. 2004. *Pemilihan Presiden Secara Langsung (Proses, Analisis dan* *Kritik).* Yogyakarta: Ristek

Karim, Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia (Sebuah Potret* *Pasang Surut )*. Jakarta: Rajawali.

Koirudin. 2004. *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Liddle, R William. 1992. *Pemilu–Pemilu Orba Pasang Surut Kekuasaan Politik,* Jakarta: LP 3 ES.

Magenda, Burhan. 1992. *Sikap Politik Tiga Kontestan.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mashad, Dhurorudin. 1999. *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde* *Baru*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI

Pabottingi, Mochtar. 1998. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Poesponegoro, Marwati Djoenoed dan Nugroho Notosusanto.1993. *Sejarah* *Nasional Indonesia VI,* Jakarta: Balai Pustaka.

Syamsuddin Haris, (ed). 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan PPW-LIPI

Soemardjan, Selo. 2000. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sulistyo, Hermawan dkk. 2000. *Kekerasan Politik Dalam Pemilu 1999, Laporan Lima Daerah.* Jakarta: KIPP.

Waridah, Siti, dkk. 2003*. Sejarah Nasinonal dan Umum*. Yogyakarta: Bumi Aksara

Widagdo, H.B dkk. 1995. *Pemilu Pelanggaran Asas LUBER*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Widodo, Hamid A. 2004. Demokrasi *Konsolidasi Menuju Kesejahtaraan Rakyat*. Dalam *Forum*. Semarang: FISIP UNDIP Press.

1. Asshidique, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya Di**Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an).* Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho**Notosusanto)****.*** Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 40 [↑](#footnote-ref-2)